

## Penyerahan Bantuan Paket Sembako



KR-Wahyu Imam Ibad

**Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyerahkan bantuan paket sembako untuk Ponpes Al Anisiyah.**

**SUKOHARJO (KR)** - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anisiyah di Desa Ngemplak Kartasura mendapat bantuan 86 paket sembako dan Legiun Veteran Indonesia (LVRI) mendapat 295 paket sembako. Bantuan paket sembako diantar sendiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Selasa (24/8). Bantuan paket sembako tersebut disalurkan dari program Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sukoharjo peduli pandemi virus korona.

Etik Suryani mengatakan, Pemkab Sukoharjo melalui program ASN Peduli Pandemi Virus Korona sejak beberapa waktu lalu menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian atas kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Bantuan paket sembako dari ASN dikoordinir oleh masing-masing OPD dan setelah terkumpul diserahkan ke Pemkab Sukoharjo untuk disalurkan kepada para penerima secara bertahap. (Mam)

## ANGGARAN TERKURAS COVID-19 Kades di Pati Kebingungan

**PATI (KR)** - Sejumlah kepala desa mengeluh tidak bisa mempercepat pembangunan infrastruktur karena anggaran desa habis terkuras untuk penanganan pandemi Covid-19. Untuk membangun desa, mereka berharap ada bantuan keuangan dari Pemprov Jateng. Hal ini terungkap saat digelar reses dan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jateng, H Alwin Basri dari Wilayah Kabupaten Pati.

Kondisi tersebut antara lain dirasakan di Desa Sampok dan Gajian Kecamatan Gunungwungkal, serta Desa Jontro, Nguresnti, Suwaduk dan Sukoharjo Kecamatan Wedarijaka. Selain menyerap aspirasi, Alwin Basri juga menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan dan membagikan sembako Kepak Sayap Kebhinekaan kepada warga tidak mampu yang terdampak Covid-19. Anggota DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono juga mengungkapkan sering mendapat informasi mengenai bansos yang tidak tepat sasaran karena data kelompok penerima manfaat (KPM) Bansos tahun ini masih mengacu data tahun 2016-2017. "Hal itu juga akan akan dibahas di Pemprov Jateng," katanya. (Cuk)

## PENGGANTI LAHAN EXIT TOL DI KARANGANYAR

# Masalah Tanah Kas Desa Belum Beres

**KARANGANYAR (KR)** - Proses ganti tanah kas Desa Wonorejo Gondangrejo untuk pembangunan tol Solo-Ngawi sampai sekarang belum beres. Nilai gantinya mencapai Rp 26 miliar.

Asisten Sekda Bidang Administrasi Pembangunan Setda Pemkab Karanganyar, Rusmanto mengatakan terdapat 23 bidang tanah kas Desa Wonorejo terkena proyek strategis nasional (PSN), luasnya sekitar 3 hektare. Sesuai aturan, penggantinya berupa tanah juga. Namun karena di sekitar desa itu tidak ada lokasi yang layak, maka diusulkan ke wilayah tiga kecamatan terdekat. Yakni Jaten, Kebakkramat dan Tasikmadu," jelasnya, Selasa (24/8).

Dalam perjalanannya, lanjut Rusmanto, diperoleh lahan berukuran 72 ribu meter persegi di tiga kecamatan tersebut. Permasalahannya,

uang pembelian lahan ganti tanah kas desa belum siap. Padahal proses itu telah berlangsung dua tahun lebih. "Pengajuan dana pembelian lahan pengganti ke Kementerian PU. Namun kendalanya, harus minta izin bupati dan gubernur, sedangkan sekarang proses ke situ belum beres," tandasnya.

Dikatakan, penggantian 23 bidang tanah kas desa itu merupakan tahap III pemberian kompensasi proyek tol Solo-Ngawi di wilayah Desa Wonorejo, karena tahap I dan II telah selesai dengan menggunakan dana talangan.

Terpisah, Kepala Desa Wonorejo, Yon Maryono mengatakan pemerintah desanya dirugikan akibat proses penggantian tanah kas desa yang terkatung-katung. Ia mencontohkan, dirinya selama dua tahun terakhir tidak mendapat

penghasilan dari tanah kas. "Penting diketahui, penghasilan Kades bukan dari gaji bulanan melainkan pemanfaatan tanah kas desa. Tol sudah sekian tahun beroperasi, namun ganti rugi untuk tanah kas belum beres," ungkapnya.

Terkait penggantian tanah kas desanya di lokasi tiga kecamatan merupakan kewenangan tim appraisal, Yon Maryono hanya minta tanah penggantinya subur, terletak di tepi jalan raya, tersedia saluran irigasi, dan harganya terjangkau.

Bupati Juliyatmono menegaskan, persoalan ganti rugi tanah kas desa Wonorejo, Gondangrejo yang terdampak proyek Tol Solo-Ngawi berada di tangan pemerintah pusat. "Sudah bukan jadi wewenang pemerintah daerah, karena itu sudah lama. Tidak ada sangkut pautnya dengan Pemda. Semua urusan itu lang-

sung berada di pemerintah pusat dengan pemerintah desa setempat. Secara administrasi juga sudah selesai," tegasnya.

Bupati mengklaim, administrasi terkait ganti rugi untuk tanah kas desa tersebut sudah dia selesaikan sebelum proses pembangunan jalan tol dikerjakan. Dia menegaskan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah pusat belum bisa memberikan uang ganti rugi tersebut. "Semua

uang belanja itu dari pusat. Untuk belanja tanah sebagai pengganti tanah kas desa Wonorejo itu juga dari pusat," tandasnya.

Menurut Juliyatmono, yang belanja adalah pusat, bukan pemerintah kabupaten, karena Pemkab Karanganyar sudah lama menyetujuinya. "Intinya, itu karena pusat saat ini tidak bisa memberikan uang ke desa. Padahal desa saat ini sudah menyiapkan lahan pengganti," ungkapnya. (Lim)



KR-Abdul Alim

Ruas exit tol di Karanganyar.

# 322 Anak di Solo Jadi Yatim

**SOLO (KR)** - Pandemi Covid-19 yang mewabah sejak Maret 2020 silam mengakibatkan sekitar 322 anak menjadi yatim setelah orangtua mereka terpapar Covid-19 hingga akhirnya meninggal dunia. Jumlah tersebut bisa berkembang lebih banyak lagi.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solo, Yuhanes Pramono, data tersebut hanya di himpun mulai penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Maret 2020 hingga Juli 2021. Padahal selama Agustus ini masih banyak terjadi kasus kematian akibat Covid-19.

"Dalam pendataan, awal sebetulnya tercatat 395 anak kehilangan orangtua, sehingga mereka menjadi yatim maupun yatim piatu. Namun setelah diverifikasi

hingga basis Rukun Tetangga (RT), data yang dinyatakan valid mencakup 322 anak, sedangkan sisanya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut," jelas Pramono menjawab wartawan di Balai kota, Senin (23/8).

Hingga saat ini, Disdukcapil Solo masih terus menelusuri sisa data yang sementara dinyatakan belum valid, dengan melibatkan beberapa institusi terkait.

Di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pendidikan (Disdik).

"Apakah ada hal-hal lain, misalnya kesalahan memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga sisa data itu dinyatakan belum valid atau memang berstatus warga luar Kota Solo," ujar Pramono.

Menurutnya, penelusuran dapat dilakukan pada saat keluarga anak-anak tersebut mengurus dokumen kependudukan, baik itu Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan lain-lain.

"Yang penting anak-anak itu tidak *kesingsal*, sebab hal itu menyangkut berbagai bantuan sosial,

terutama terkait masalah pendidikan. Proses pendidikan mereka tidak boleh terputus, karena pendataan sejak awal melibatkan institusi yang terkait dengan distribusi bantuan tersebut," tandasnya.

Mengenai hasil pendataan, Pramono menyebutkan, saat ini telah dilaporkan kepada Walikota Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ahyani. Itu sebagai dasar menentukan tindakan lanjut.

Hasil pendataan lanjutan, baik data anak-anak yang sementara ini dinyatakan beum valid maupun data anak yatim piatu mulai Agustus dan bulan berikutnya, pada saatnya nanti juga akan dilaporkan secepat mungkin. (Hut)

# HUKUM

## KELUARKAN SP3 KASUS DISKRIMINASI ANAK YIS Polres Sleman Digugat Praperadilan

**SLEMAN (KR)** - Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan orangtua siswa sekolah Internasional YIS, Erika Handriati (51), digelar perdana di PN Sleman, Senin (23/8). Gugatan Praperadilan ditujukan pada Kapolri cq Kapolda DIY cq Kapolres Sleman yang telah mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas Laporan Polisi LP/582/VIII/2018/DIY/Sleman tanggal 31 Agustus 2018.

"Saat itu Erika melaporkan Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (YPIY) yang menaungi Yogyakarta Independent School (YIS) karena dinilai telah melakukan diskriminasi terhadap anaknya. Namun April 2021 penyidikan dihentikan oleh Polres Sleman," tutur Kuasa Hukum Pemohon/Penggugat Erika H, Kardiansyah Afkar SH di depan hakim tunggal Joko Saptono SH.

Afkar yang didampingi Afif Amrullah SH menegaskan tidak seharusnya Polres Sleman mengeluarkan SP3 karena penyidik sudah menemukan dua alat bukti dari laporan itu. "Sehingga saat proses penyelidikan naik menjadi penyidikan

tentunya unsur pidananya telah terpenuhi," tegasnya.

Namun di tengah jalan, penyidikan dihentikan dengan alasan tidak ditemukannya tersangka. "Suatu tindak pidana, tidak mungkin tak ada tersangkanya. Persoalan tak ditemukan tersangka tidak bisa jadi alasan menghentikan penyidikan. Penyidikan dapat terus berlangsung saat laporan sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup," jelasnya.

Afkar berharap permohonan praperadilan dikabulkan sehingga laporan kliennya di Polres Sleman bisa dilanjutkan kembali. "Dihentikannya penyidikan dengan alasan seperti itu sangat mencederai tegaknya hukum di tanah air," ujarnya.

Sementara Tim Kuasa Hukum Polda DIY, Heru Nurcahya SH, menyatakan akan mendalami apa yang diajukan pemohon. "Kita terus mengumpulkan segala hal terkait dengan penetapan tersangka, juga digali lagi alasan apa sehingga penyidikan perkara ini dihentikan," ujarnya. (Vin)

## Cucu Diduga Bakar Rumah Nenek

**PURWOREJO (KR)** - Kebakaran menimpa rumah Kliwen (75) warga Desa Karanganyar Pituruh Purworejo, Minggu (22/8) malam. Rumah nenek renta itu diduga Dibakar cucunya sendiri berinisial Bo, yang menderita gangguan jiwa. Peristiwa itu menyebabkan korban menderita kerugian hingga Rp 50 juta.

Kapolsek Pituruh, AKP Sapto Hadi, mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh Suyono Kades Karanganyar. Ketika itu Suyono tengah berada di warung seorang warga yang berjarak sekitar seratus meter dari rumah korban.

Saksi melihat asap dan kobaran api berasal dari arah rumah korban sekitar pukul 19.00.

"Saksi berlari menuju rumah korban sambil mengajak beberapa warga. Sampai lokasi kejadian, api sudah membesar," ujarnya.

Suyono bersama warga lain mencoba

memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah anggota Polsek Pituruh juga membantu pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30. Namun, kondisi rumah nyaris hancur akibat kobaran api.

Polisi menyelidiki peristiwa itu dan meminta keterangan sejumlah saksi. "Berdasarkan penuturan saksi dugaan kuat kebakaran itu akibat ulah cucu korban, penderita gangguan jiwa, yang mengamuk pada siang sebelum kejadian," tuturnya.

Pria itu diketahui mengamuk kepada Kliwen karena nenek itu menolak untuk memberikan sejumlah uang sesuai permintaan Bo. Keluarga mengungsikan Kliwen di rumah kerabatnya, sedangkan Bo ditinggalkan sendirian di rumah.

Malam menjelang kejadian, saksi lain yang kebetulan lewat sekitar rumah Kliwen, lari ketakutan akibat dikejar Bo. (Jas)

## DUGAAN KORUPSI APBD PURBALINGGA

# Jadi Tersangka, Mantan Camat Ditahan

**PURBALINGGA (KR)** - Melalui penyelidikan dan penyidikan selama 5 bulan, Kejari Purbalingga akhirnya menahan mantan camat Purbalingga, MR (55), di rumah tahanan (Rutan) Purbalingga, Senin (23/8) sore. Diringi isak tangis istrinya, MR pasrah saat digiring ke minibus yang membawanya ke rutan.

Saat digiring menuju mobil, MR yang berambut putih penuh sudah mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Berjalan menunduk dengan pengawalan tim kejaksaan, MR langsung masuk mobil tanpa menghuruaukan pertanyaan wartawan.

Sebelum dibawa ke Rutan Purbalingga, istri tersangka sempat memenuinya di gedung kejaksaan. Masih mengenakan seragam dinas, pe-

jabat setingkat kepala bidang di sebuah dinas di Purbalingga itu tampak menangis menyaksikan suaminya mengenakan rompi orange digiring ke rutan.

"Hari ini kami menetapkan MR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami langsung melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan kelas II B Purbalingga," jelas Kasi Intel Kejari, Indra Guna-

wan, Senin (23/8) sore.

Indra yang didampingi Kasi Pid-sus, Tandio Sugondo, menyebutkan alasan penahanan itu dilakukan memudahkan penyidikan lebih lanjut. Penahanan itu juga karena ancaman hukuman lebih dari lima tahun mencegah tersangka menghilangkan barang bukti.

MR menyalahgunakan dana APBD sejak Januari tahun 2017 hingga Maret 2020. Tim penyidik dan Inspektorat Kabupaten Purbalingga menghitung kerugian negara mencapai Rp 400 juta. Penyidik belum menetapkan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka. "Total kerugian negara sebesar Rp 424.965.-960 dan dikembalikan sebesar Rp 110.115.446," ujarnya. (Rus)

## KASUS PEMBUNYAN DI NGEMPLAK TERUNGKAP Pelaku Kesal Korban Terus Pinjam Uang

**SLEMAN (KR)** - Kerja keras petugas gabungan dalam mengungkap pembunuhan terhadap Dita (21) warga Klaten Jawa Tengah, membuahkan hasil. Petugas Polres Sleman, Polsek Ngemplak dan Polda DIY menangkap RMD (21) pria asal Klaten Jawa Tengah sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut.

Penangkapan dilakukan di Tenggarong Kutai Kartanegara, tempat di mana tersangka akan bekerja di perkebunan sawit. "Pencarian tersangka ini melakukan proses yang panjang, karena tersangka kita temukan di Tenggarong Kutai Kartanegara, tempat dimana tersangka akan bersembunyi dengan bekerja di sebuah perkebunan sawit," jelas Direskrim Polda DIY Kombes Pol Burkan Rudy Satria SIK di Mapolres Sleman, Selasa (24/8).

Pembunuhan dilakukan karena tersangka sakit hati dengan korban yang merupakan teman SMP-nya

tersebut. "Kalau kita lihat dari peristiwanya, dapat disimpulkan tersangka ini sakit hati dengan korban," lanjutnya.

Tersangka menghajar kepala korban dengan batu sehingga korban dimungkinkan langsung meninggal di TKP Malam setelah mengeksekusi korban tepatnya Sabtu (18/7) sekitar pukul 20.00, tersangka datang lagi dan memindahkan jasad korban ke sekitar TKP kemudian diburukkan lubang dan dikubur.

Burkan mengungkapkan, saat itu tersangka meminjam cangkul milik warga setempat dengan alasan untuk menguburkan kucing. "Dari keterangan warga itulah, kita menelusuri tersangka yang diketahui bekerja di sebuah kandang ayam wilayah Ngemplak," ungkap Burkan.

Tersangka yang merupakan residivis kasus curanmor ini, dijerat tiga pasal dengan korban yang merupakan teman SMP-nya

dan perampasan. Pasalnya selain membunuh, tersangka juga mengambil sepeda motor milik korban kemudian ditukar dengan motor lain. Sedangkan sisa uang penjualan digunakan untuk perjalanan ke Kutai Kartanegara.

Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Deni Irwan-syah SIK menambahkan, tersangka sakit hati karena selalu dipinjam uang oleh korban. Puncaknya saat korban mendatangi tersangka di rumahnya, Jumat (16/7), kemudian keduanya berboncengan sepe-

da motor. Sepanjang perjalanan, korban kembali meminjam uang Rp 1 juta, namun tersangka mengatakan sedang tidak punya uang. "Sebelum kejadian, korban pinjam uang lagi padahal utang sebelumnya belum dibayar dan menurut tersangka, korban ini sifatnya memaksa sehingga tersangka kesal," urai Deni.

Kasubag Humas Polres Sleman Iptu Edy Widaryanta menyebut, korban juga sempat menyampaikan kepada tersangka, jika tak dipinjam uang, maka akan dilaporkan ke polisi. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

Tersangka RMD dan dijerat pasal berlapis.